

NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Huriah Rachmah

STKIP Pasundan Cimahi
Email: okketea@gmail.com

Abstrak: Pembangunan karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. Tujuan penulisan makalah ini adalah membahas tentang nilai-nilai karakter bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Timbulnya pendidikan karakter bangsa pada tingkat satuan pendidikan disebabkan oleh kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku tidak terpuji dan tidak menghargai budaya bangsa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan memperlihatkan guru sebagai eksekutor di kelas mempunyai tanggung jawab untuk memberikan contoh bagaimana implementasi pendidikan karakter sehingga walau awalnya terpaksa, hingga menjadi dapat dan akhirnya terbiasa sehingga pada akhirnya karakter tersebut akan muncul dan dapat menjadi karakter bangsa yang sesungguhnya.

Kata kunci: nilai, pendidikan, karakter, pancasila, UUD 1945

Abstract: Character building is an effort to mandate the embodiment of Pancasila and 1945 Constitution against the backdrop of the reality of a growing national problem today, such as disorientation and yet there is appreciation of the values '3f '3fof Pancasila; limitations of integrated policy tools in realizing the values '3f '3fof Pancasila; shifting of ethical values '3f '3fin the life of the nation and state; waning awareness of national cultural values '3f '3f; threat of national disintegration, and the weakening of national independence. The purpose of this paper is to discuss the values '3f '3fof the nation's character is based on Pancasila and 1945 Constitution. The emergence of the nation's character education at the unit level of education due to the condition of this nation are increasingly showing improper behavior and do not respect national culture. The method used literature research with descriptive analysis technique. The result are classroom teacher as an executor has the responsibility to provide examples of how the implementation of character education so that though at first unwillingly, and to be able to finally get used to that in the end the character will appear and can be a real character of the nation.

Key words: value, education, character, pancasila, UUD 1945

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah adanya realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Kemdiknas, 2010:8-9).

Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu mempertahankan budayanya sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Mempertahankan budaya bangsa di tengah gempuran budaya asing merupakan hal yang tidak

mudah. Pada salah satu sarasehan nasional yang diselenggarakan Kemendiknas pada 14 Januari 2010 dideklarasikan tentang “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Deklarasi ini secara jujur diakui disebabkan oleh kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku tidak terpuji dan tidak menghargai budaya bangsa. Perilaku tidak terpuji tersebut antara lain memudarnya sikap kebhinekaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu perilaku anarkhisme dan ketidakjujuran marak di kalangan peserta didik. Seperti tawuran, menyontek dan plagiarisme. Di sisi lain banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara sehingga korupsi semakin merajalela di hampir semua instansi pemerintah. Perilaku-perilaku seperti itu

menunjukkan bahwa bangsa ini telah terbelit oleh rendahnya moral, akhlak atau karakter (Zuchdi, 2010:1).

Degradasi karakter yang memprihatinkan akhir-akhir ini timbul di dunia pendidikan, seperti kasus kecurangan ujian nasional, dimana Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat adanya kecurangan yang bersifat struktural pada Ujian Nasional SMA dan SMK di tujuh daerah yaitu di Sumatera Utara, Brebes-Jawa Tengah, Pulau Muna-Sulawesi Tenggara, Bekasi-Jawa Barat, Pandeglang-Banten dan DKI Jakarta. Menurut Retno Listyani selaku Sekjen FSGI, data ini dikumpulkan dari guru-guru tingkat SMA, SMK dan MA. Kecurangan yang terjadi sudah merupakan kecurangan struktural yang terencana dan melibatkan peserta didik, guru, sekolah dan pengawas ujian (Waspada Online, 2012: <http://www.waspada.co.id>).

Informasi lain misalnya di Sumatera Utara, FSGI mencatat, para siswa mendapat kunci jawaban dari lima paket ujian nasional yang sejak pagi hari mereka salin dari oknum tertentu. Para siswa kemudian menyembunyikan kunci jawaban tersebut di kaos kaki dan dasi. Di Brebes, Serikat Guru Brebes menemukan siswa di sebuah sekolah non-unggulan menyalin kunci jawaban di musala sekolah sebelum ujian dimulai. Akan tetapi, kecurangan ini sudah direncanakan dengan sangat rapi, melibatkan kepala sekolah, dan panitia penyelenggara. Dengan demikian, sulit membuktikan kecurangan tersebut (Waspada Online, 2012:1).

Maraknya kemerosotan moral di pendidikan di temukan pula di Pulau Muna, Sulawesi Selatan, FSGI menemukan lembar jawaban ujian nasional yang tidak dilem sebelum diserahkan kepada sekolah. Selain itu, kunci jawaban ujian juga tidak langsung dibawa ke Polres. Dua kejadian ini memberi peluang sekolah untuk memperbaiki jawaban siswanya. Di Bekasi, kecurangan struktural di daerah ini justru dimulai sebelum Ujian Nasional. Sekolah melakukan manipulasi nilai ujian sekolah untuk memenuhi target kelulusan. Bahkan, kecurangan ini dikabarkan merupakan instruksi dari kepala dinas pendidikan. Di Pandeglang, Jawa Barat, FSGI menerima laporan, di sebuah sekolah, pengawas

menemukan kunci jawaban pelajaran Matematika lengkap dengan lima variasi soalnya. Hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta. Pengawas menemukan siswa di beberapa sekolah membulatkan jawaban tanpa melihat soal (Waspada Online, 2012:1).

Merujuk pada kasus-kasus di atas, terlihat bahwa kecurangan tersebut sudah direncanakan oleh guru dan kepala sekolah, dimulai dari peserta didik diminta datang pagi-pagi dan menyalin jawaban yang sudah disediakan oleh guru. Bahkan bukan hanya pihak sekolah yang terlibat namun pihak kepala dinas seperti di Bekasi. Tentu saja walaupun kasus tersebut disebut hanya isu yang tidak dapat dibuktikan karena ketiadaan data dan fakta oleh Kabalitbang Kemdikbud (Akuntono dan Asdhiana, 2012:1), namun tetap saja kasus-kasus tersebut harus ditelusuri penyebabnya. Faktor utama terjadinya kecurangan UN adalah masalah ketakutan; peserta didik takut tidak lulus, guru takut dicap tidak mampu mengajar dan takut dicap membangkang jika tidak ikut membantu, kepala sekolah takut citra sekolahnya melorot apabila ada peserta didik yang tidak lulus, kepala dinas takut turun jabatan kalau sekolah yang berada di bawah dinasny terdapat peserta didik yang tidak lulus.

Degradasi karakter pun muncul karena adanya contoh kurang baik dari orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua dan lainnya. Misalnya budaya buang sampah sembarangan, budaya terlambat, budaya tidak sabaran dan budaya merokok. Survei yang dilakukan oleh Adrianison, Faisal Yunus dan Wiwien Heru Wiyono (2005) tentang Kekerapan Merokok serta Hubungan antara Pengetahuan, Sikap dan Prilaku Merokok dan Karyawan SMP di kota Depok 2004 terhadap 1131 orang guru dan karyawan sekolah menunjukkan bahwa sebanyak 21,8% (247 orang) pendidik dan tenaga kependidikan merokok dan 82,2% dari 247 orang (203 orang) merokok dilingkungan sekolah dikarenakan tidak adanya peraturan yang melarang guru merokok di sekolah. Adanya pencanangan area bebas rokok pun tidak terlalu berdampak kepada kebiasaan merokok guru di sekolah (Adrianison, Yunus dan Wiyono, 2005:1-2).

Ali Nugraha dan Yeni P (2006) dalam (Sugiyanto,

tanpa tahun, 6) melakukan survei terhadap orang tua dan guru, bahwa generasi sekarang lebih banyak memiliki kesulitan emosi dan sosial dari pada generasi sebelumnya. Generasi sekarang lebih kesepian dan pemurung, lebih beringas, kurang memiliki etika, mudah cemas, gugup dan lebih implusif. Persoalan tidak berhenti disitu, ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* pun terjadi. Terjadi benturan perilaku antara yang diterima di sekolah dengan di rumah atau sebaliknya sehingga pelajaran moral yang baru didapat diruang kelas tidak terlalu bermanfaat karena tidak dapat dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari.

Sekolah bukanlah satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter. Walaupun seringkali guru dan lembaga sekolah yang dipersalahkan dan dipermasalahkan setiap kali terjadi kasus yang menimpa peserta didik. Mulai dari sekedar menyorot ketidakseriusan guru dalam mendidik dan krisis keteladanan guru, mempersoalkan kurikulum, sampai kepada mempermasalahkan perlu tidaknya pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter dihidupkan kembali atau menambah jumlah pelajaran agama di samping pelajaran PPKn dan moral Pancasila yang semakin kehilangan orientasinya (Sugiyanto, tanpa tahun: 4).

Namun walaupun bukan satu-satunya lembaga yang harus disalahkan, sistem pendidikan dan pembelajaran memang banyak mendapatkan kritik. Pendidikan kita dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi kurang dalam hal emosi dan moral. Sebagian bahkan menilai pendidikan Indonesia terkesan mekanistik, *full* hafalan dan mematikan kreativitas peserta didik. Kondisi ini mencemaskan berbagai pihak, apalagi dengan melihat pendapat Thomas Lickona (1992) dalam Eva Imania Eliasa (tanpa tahun:3) bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) Ketidakjujuran yang membudaya, (3) Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin, (4) Pengaruh teman sebaya terhadap tindakan kekerasan, (5) Meningkatnya kecurigaan dan kebencian, (6) Penggunaan bahasa yang buruk, (7)

Penurunan etos kerja, (8) Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) Meningkatnya perilaku merusak diri, (10) Semakin kaburnya pedoman moral. (Lickona dalam Eliasa)

Sekitar abad ke-5 SM Sokrates mengungkapkan slogan “Kenalilah dirimu sendiri” yang berarti mempunyai identitas yang menjadi jati diri sebagai manusia maupun bangsa. Ungkapan lainnya adalah “engkau harus mengerti siapa dirimu sebenarnya” mengawali nasihat Dewa Ruci ketika Werkudoro akan menerima Tirta Kamandaru dalam cerita pewayangan (Sugiharto, 2010:1). Jati diri atau karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009:1).

Karakter dan budaya suatu bangsa harus dipertahankan sehingga dapat dibedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good (moral feeling)* dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik (Kemdiknas, 2011:6).

Berdasarkan hal yang telah diungkapkan di atas, maka masalah pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, namun lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian baik sebagai warga negara maupun individu. Oleh karena itu, maka permasalahan yang akan diungkapkan adalah: “Bagaimana Menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?”

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu

menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang mendukung dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis.

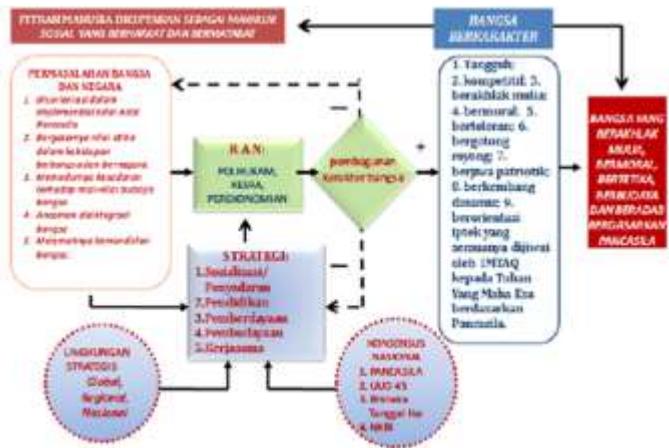
PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Alur pikir pembangunan karakter menempatkan pendidikan merupakan salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter bangsa yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koheren dengan beberapa strategi yang mencakup sosialisasi atau penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia usaha dan industri (Kemdiknas, 2011:6), seperti terlihat pada bagan 1 berikut:

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dapat dikatakan bahwa “bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri”. Membangun berarti bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, dan mengadakan sesuatu. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Jadi membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Suhady dan Sinaga, 2006:64-66).

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi baik dalam pengertian ideologi negara atau ideologi bangsa masih dipertahankan. Namun, seiring kesalahan tafsir bahwa Pancasila dipergunakan untuk memperkuat otoritarianisme negara. Salah satu ciri kekuasaan yang otoriter di manapun adalah selalu menganggap ideologi sebagai maha penting yang berhubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Tetapi asumsi bahwa usaha menyeragamkan ideologi penting demi menciptakan stabilitas dan memperkuat kohesi masyarakat adalah menyesatkan (Wahyudi, 2004:3).



Bagan 1. Alur Pikir Pembangunan Karakter (Kemdiknas, 2011:6)

Dalam melaksanakan dan mengawal pembentukan karakter bangsa diperlukan komitmen yang serius sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan kepada warga sekolah dapat menjadikan peserta didik menjadi insan paripurna yang tentu saja melibatkan isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan warga sekolah, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan berbagai kegiatan peserta didik, pemberdayaan sarana dan prasarana serta etos kerja seluruh warga sekolah yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan rasa cinta dan berla terhadap negara dan tanah air.

Bagaimanapun sejarah telah membuktikan bahwa nilai materiil Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu. Nilai-nilai yang terkandung

di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian, dan pandangan hidup masyarakat di wilayah nusantara sejak dahulu (Laksono, 2008:2).

Oleh karena itu pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila yang meliputi:

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik.
2. Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila
3. Mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Kemdiknas, 2011:7).

Selama ini nilai-nilai dan prinsip-prinsip UUD 1945 dan Pancasila telah diwariskan dan telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat seperti Proklamasi Kemerdekaan, lima sila dalam Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Sementara prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai negara kesatuan yang berbentuk republik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, sistem Bhineka Tunggal Ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, sistem ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan kewajiban semua warga negara, pemerintahan presidensial dan pengawasan oleh DPR (Suhady dan Sinaga, 2006:55-59).

Melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip UUD 1945 tersebut, maka pendidikan karakter yang dikembangkan memang mengarah kepada nilai dan prinsip tersebut yang intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pendidikan Karakter

Kemunculan gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, dapat dimaklumi karena selama ini proses pendidikan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter, bahkan banyak yang menyebut, pendidikan telah gagal karena banyak lulusan sekolah

atau sarjana yang piawai dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah. Penyebabnya adalah banyak pakar bidang moral dan agama yang sehari-hari mengajar tentang kebaikan tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkan. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, kebersihan dan jahatnya kecurangan. Tetapi nilai-nilai kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang waji dipelajari saja. Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian saja tetapi justru memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, ksatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungan kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal (Husaini, 2010:25)

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu: Religius, Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab (Kemdiknas, 2011:8).

Meskipun demikian satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun (Kemdiknas, 2011:8).

Upaya membangun karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-itanya dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi negara serta pesan para pendiri negara (Sapriya, 2007:24). Pidato pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial pada Tahun 1930 menegaskan sebagai berikut:

Kalau bangsa Indonesia ingin mencapai kekuasaan politik, yakni ingin merdeka, kalau bangsa kami itu ingin menjadi tuan didalam rumah sendiri, maka ia harus mendidik diri sendiri, menjalankan perwalian atas diri sendiri, berusaha dengan kebiasaan dan tenaga sendiri Soekarno, 1930:92 dalam (Sapriya, 2007:24)

Pernyataan ini jelas bahwa salah satu karakter warga negara yang harus dibangun adalah karakter kemandirian sebagai sebuah bangsa. Sehingga semakin jelas bahwa karakter bangsa Indonesia yang diharapkan jauh sebelum lahir bangsa dan beridrihnya negara Indonesia.

Penanaman Nilai Pendidikan Karakter

Saat ini di semua jenjang pendidikan mulai diterapkan pendidikan karakter yang merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan sehingga secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Kemdiknas, 2011:9).

Pelaksanaan pendidikan karakter sesuai dengan panduan pelaksanaan dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu (1) integrasi melalui mata pelajaran, (2) integrasi melalui muatan lokal dan (3) integrasi melalui pengembangan diri. Pendidikan karakter yang terintegrasi di dalam mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri adalah pengenalan nilai-nilai yang diperolehnya kesadaran akan pentingnya dan bagaimana penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas (Kemdiknas, 2011:40).

Saat ini guru dituntut untuk membuat silabus dan rencana persiapan pembelajaran (RPP) yang berkarakter, artinya, memuat beberapa nilai pendidikan karakter dalam indikator dan kegiatan pembelajarannya. Hal yang perlu

dicermati adalah bagaimana agar nilai-nilai yang dicantumkan tersebut benar-benar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Guru selaku eksekutor di lapangan harus mengetahui karena guru yang membuat sendiri RPP nya sehingga tahu persis apa yang dibuatnya.

Dalam pendidikan karakter yang penting bukan apa yang ditulis guru dalam RPP tapi apa yang dilakukan dan dicontohkan guru ke peserta didik. Untuk itu perlu diketahui bagaimana kita selaku pendidik memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik sehingga fungsi dan tujuan Kaya Karsa dapat tercapai. Gagasan lama yang sampai saat ini masih relevan atau kembali relevan dengan kondisi saat ini yaitu gagasan Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan.

Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa pengajaran (*onderwijs*) itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bagian dari pendidikan di mana selain memberikan ilmu atau pengetahuan juga memberi kecakapan (keterampilan) kepada anak-anak yang keduanya dapat berfaedah baik lahir maupun batin (Dewantara, 1962:67). Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri seseorang agar dapat hidup sebagai individu dan masyarakat yang berguna di masa yang akan datang. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran dan tubuh anak yang tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak.

Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan konsep pendidikan sistem among yang meliputi *ing ngarsa sung tuladha* (jika di depan memberi teladan-mengandung nilai keteladanan, pembimbingan dan pemanduan), *ing madya mangun karsa* (jika ditengah-tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan, yang bermakna peserta didik didorong untuk mengembangkan karsa atau gagasannya-mengandung nilai kreativitas dan pengembangan gagasan serta dinamisasi pendidikan) dan *tut wuri handayani* (jika dibelakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai dan peserta didik diberi motivasi serta diberi dukungan

psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan – mengandung nilai memantau, melindungi, merawat, menjaga, memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan, sambil memberikan kebebasan untuk bernalar dan mengembangkan karakter peserta didik) sebenarnya sarat akan nilai-nilai karakter (Samani dan Hariyanto, 2011:6).

Jadi dapat dilihat bahwa konsep Kaya Karsa mengadopsi konsep sistem among Ki Hajar Dewantara, sehingga pendidikan karakter sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi merupakan penggalian nilai-nilai lama dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dapat menjadi contoh yang langsung dapat ditiru oleh peserta didik dengan mengikuti ajaran dan fatwa Ki Hajar Dewantara dengan menonjolkan karakter:

1. *Tetep-Mantep-Antep*

a. *Tetep* mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas kependidikan dan pembangunan bangsa harus berketetapan hati. Tekun bekerja tanpa menoleh kanan kiri yang berarti melenakan perjuangan.

b. *Mantep* berarti tetap tertib berjalan maju selalu setia dan taat asas, teguh iman sehingga tidak ada kekuatan yang dapat menahan gerak dan langkah kita.

c. *Antep* berarti segala perbuatan dan tindak laku kana berisi dan berharga, tidak mudah dihambat dan dirintangi orang lain.

2. *Ngandel, Kendel, Bandel, Kandel*

a. *Ngandel*, Maknanya, kita harus percaya dan yakin sepenuhnya, pada kekuasaan dan takdir serta pada kekuatan serta kemampuan diri sendiri.

b. *Kendel* artinya berani, berani menghadapi segala sesuatu yang merintangi, tidak ada ketakutan, was was dan keraguan hati karena *Ngandel*.

c. *Bandel* artinya kokoh, teguh hati tahan banting disertai sikap tawakal kan kehendak Tuhan.

d. *Kandel* berarti tebal serta kuat lahir batin sebagai kekuatan untuk menuju cita-cita

3. *Neng-Ning-Nung-Nang*

a. *Neng-meneng* berarti tidak ragu dan malu

b. *Ning-wening* berarti bening, jernih pikiran, tidak mengedepankan emosi, mampu dan mudah membedakan antara yang hak dan yang batil

c. *Nung – hanung* berarti kokoh, senantiasa kuat, teguh dan kukuh lahir batin

d. *Nang – menang dan wenang* berarti memperoleh kemenangan dan memiliki kewenangan berhak dan berkuasa memiliki hasil jerih payah kita.

Apabila pendidik mampu mengimplementasikan ajaran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai fungsi dan tujuan dari Kaya Karsa maka dapat dipastikan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa tidak akan hanya menjadi wacana saja tetapi dapat dijadikan contoh kepada peserta didik sehingga menjadi panutan di sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Degradasi karakter muncul karena adanya contoh kurang baik dari orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua dan lainnya. Misalnya budaya buang sampah sembarangan, budaya terlambat, budaya tidak sabaran dan budaya merokok.

2. Pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah.

3. Nilai materiil Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia.

Saran-saran

1. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat ditanamkan kepada peserta didik bukan melalui hapalan tetapi tindakan. Aplikasi sila-sila dalam Pancasila dapat disisipkan pada saat pembelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran yang lainnya.

2. Dalam pendidikan karakter yang penting bukan apa yang ditulis guru dalam RPP tapi apa yang dilakukan dan dicontohkan guru ke peserta didik.

3. Guru dapat mengacu kepada pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dapat menjadi contoh yang langsung dapat ditiru oleh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianison, Faisal Yunus, dan Wiwien Heru Wiyono. "Kekerapan Merokok serta Hubungannya antara Pengetahuan, Sikap dan Prilaku Merokok Guru dan Karyawan SMP di Kota Depok 2004." *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2005.
- Akuntono, Indra, dan I Made Asdhiana. "Kemdikbud Sikapi Kecurangan UN dengan Objektif." *Kompas.Com*. 16 April 2012. <http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/18061415/Kemdikbud.Sikapi.Kecurangan.UN.dengan.Objektif> (diakses Mei 30, 2012).
- Dewantara, K. H. *Pendidikan*. Jogjakarta: Taman Siswa, 1962.
- Eliasa, Eva Imania. *Peran Bimbingan Konseling dalam Pendidikan Karakter Siswa (Kajian Psikologis Berdasarkan Teori Sistem Ekologis)*. Yogyakarta: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta, tanpa tahun.
- Husaini, Adian. "Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab." Dalam *Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*, 24-33. Bandung: Prodi PU SPs UPI, 2010
- Kemdiknas. *Buku Induk Pembangunan Karakter*. Jakarta, 2010.
- Kemdiknas. *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta, 2010.
- Kemdiknas. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta, 2011.
- Laksono, Danang Tunjung. "Pemahaman Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Intensitas Bimbingan Moral oleh Orang Tua Pengaruhnya terhadap Kesadaran Bahaya Perilaku Menyimpang pada Remaja di Kabayanan II Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008." *Skripsi*. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah, 2008. 1-8.
- Samani, Muchlas, dan Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Rosda, 2011.
- Sapriya. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara." *Jurnal Sekolah Dasar Tahun 16 Nomor 1*, Mei 2007.
- Sugiharto, Lukas. "Masih Eksisakah Karakter Bangsa (Indonesia)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2010: Volume 11 No 1, Februari.
- Sugiyanto. *Kekerasan di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial Emosional*. Yogyakarta: PPB FIP UNY, tanpa tahun.
- Suhady, Idup, dan A M Sinaga. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2006.
- Suyatno. Urgensi Pendidikan Karakter." *Mandikdasmen depdiknas web site*. 2009. <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html> (diakses 06 26, 2011).
- Wahyudi, Agus. *Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2004.
- Waspada Online. "Data:Ada Kecurangan UN Terencana di Sumut." *Waspada Online: Pusat Berita Informasi Medan Sumut Aceh*. 19 April 2012. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242976:data-ada-kecurangan-un-terencana-di-sumut&catid=15:sumut&Itemid=28 (diakses Mei 30, 2012).
- Zuchdi, Darmiyati. *Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif: Terintegrasi dalam Perkuliahan dan Pengembangan Kultur Universitas*. Yogyakarta: UNY Press, 2010.